

**PENGELOLAAN ASET DAERAH DI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**

Muhammad Riski Fadillah¹, Ramona Handayani², Barkatullah³

Program Studi Adminstrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

e-mail: kii609806@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan dalam pengelolaan aset daerah meliputi pencatatan aset yang belum akurat, keterbatasan pengetahuan pengelola, dan belum optimalnya jaringan internet. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada subvariabel perencanaan, perumusan tujuan, penyusunan langkah, dan pengambilan keputusan pengelolaan aset telah berjalan dengan baik sesuai prosedur. Namun, pada subvariabel pengorganisasian, penempatan pengelola dan pembagian tugas masih kurang optimal karena keterbatasan pengetahuan dan ketidakjelasan tanggung jawab. Pada subvariabel penggerakan, pengarahan sumber daya manusia, pelaksanaan pengelolaan, dan pencapaian tujuan pengelolaan aset dinilai belum optimal akibat ketidakakuratan data, keterbatasan kompetensi, dan kendala jaringan. Selanjutnya, pada subvariabel pengawasan, pengendalian, realisasi perencanaan, dan evaluasi pengelolaan aset juga belum berjalan dengan baik karena keterbatasan anggaran dan ketidaktepatan data. Faktor penghambat meliputi kurangnya pemahaman prosedur, keterbatasan jumlah pegawai, pembagian tugas yang belum jelas, data aset yang tidak akurat, tidak adanya evaluasi terjadwal, serta keterbatasan anggaran. Adapun faktor pendukungnya adalah tersedianya sarana dan prasarana serta pelaksanaan pengelolaan aset yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci: Pengelolaan, Aset Daerah, Kabupaten Balangan

ABSTRACT

Problems in regional asset management include inaccurate asset recording, limited manager knowledge, and suboptimal internet connection. This study used a qualitative descriptive method with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The results showed that the sub-variables of planning, goal formulation, step preparation, and decision-making for asset management have been running well according to procedures. However, in the sub-variables of organizing, manager placement and division of tasks are still less than optimal due to limited knowledge and unclear responsibilities. In the sub-variables of mobilizing, directing human resources, implementing management, and achieving asset management goals are considered less than optimal due to inaccurate data, limited competencies, and network constraints. Furthermore, in the sub-variables of monitoring, controlling, planning realization, and evaluating asset management, they have also not run well due to budget limitations and inaccurate data. Inhibiting factors include a lack of understanding of procedures, limited number of employees, unclear division of tasks, inaccurate asset data, the absence of scheduled evaluations, and budget limitations. Supporting factors are the availability of facilities and infrastructure and the implementation of asset management that is carried out in accordance with applicable regulations.

Keywords: Management, Regional Assets, Balangan Regency

PENDAHULUAN

Pemanfaatan aset properti daerah dapat berjalan secara optimal apabila seluruh tahapan penilaian terhadap properti tersebut telah terpenuhi secara menyeluruh. Proses penilaian aset tidak dapat dilakukan secara asal, melainkan harus melalui perhitungan dan analisis yang dilakukan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan. Penilaian tersebut harus menghasilkan nilai aset yang wajar dan memiliki daya jual (marketable), sehingga nilai yang diperoleh mencerminkan kondisi aset yang sesungguhnya dan akurat.

Kabupaten Balangan sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan saat ini berada dalam fase pembangunan dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan, yang berfungsi sebagai unsur pembantu pimpinan kepala daerah, memiliki peran penting dalam koordinasi administrasi dan operasional pemerintahan daerah, termasuk tanggung jawab dalam pengelolaan aset yang berada di bawah kewenangannya. Sebagai pusat aktivitas administrasi pemerintah daerah, Sekretariat Daerah mengelola berbagai jenis aset, mulai dari tanah, bangunan, kendaraan dinas, peralatan perkantoran, hingga aset tidak berwujud, yang seluruhnya harus dikelola secara tertib, efisien, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi pemerintah daerah dalam pengelolaan aset adalah belum tertibnya administrasi dalam pengendalian dan inventarisasi aset. Kondisi ini juga terjadi dalam pengelolaan aset tetap di Kabupaten Balangan, yang ditandai dengan keterbatasan data dan informasi mengenai kondisi fisik serta nilai aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Padahal, inventarisasi aset merupakan komponen yang sangat penting dalam siklus pengelolaan aset. Ketidakteraturan tersebut menyebabkan pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam mengetahui secara pasti jumlah aset yang dimiliki, status penguasaannya, serta aset-aset yang berpotensi untuk dikembangkan dan memiliki peluang investasi yang tinggi.

Permasalahan yang ditemukan pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan antara lain masih terdapat aset daerah yang belum tercatat secara akurat. Beberapa aset belum dilengkapi dengan dokumen legalitas yang memadai, tidak tercatat dengan baik dalam basis data aset, bahkan belum dilakukan penilaian secara berkala. Hal ini mengakibatkan terjadinya perbedaan antara kondisi aset di lapangan dengan data administrasi yang dimiliki. Aset tersebut meliputi peralatan kantor seperti laptop, printer, dan kendaraan dinas yang jumlah serta keberadaannya tidak sesuai dengan data pencatatan, bahkan ada yang dinyatakan hilang atau tidak diketahui lokasi pastinya (Sumber: Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan, 2025).

Selain itu, keterbatasan pengetahuan pengelola aset juga menjadi permasalahan yang cukup signifikan. Petugas pengelola aset belum sepenuhnya menguasai sistem atau aplikasi pencatatan aset berbasis digital, sehingga proses administrasi berjalan lambat dan berpotensi menimbulkan kesalahan data. Pemahaman terhadap prosedur pengamanan aset, baik secara fisik maupun administratif, juga masih kurang memadai. Di samping itu, penyusunan laporan pertanggungjawaban aset belum dilakukan secara sistematis dan belum sepenuhnya sesuai dengan standar pelaporan yang ditetapkan. Dari jumlah pengelola aset sebanyak sepuluh orang, hanya sebagian kecil yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi, sementara sebagian lainnya berlatar belakang pendidikan menengah, sehingga pengelolaan aset belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan (Sumber: Data Jumlah Pegawai, 2025).

Permasalahan lainnya adalah belum optimalnya dukungan jaringan internet yang berdampak pada pemanfaatan aplikasi pengelolaan aset berbasis daring. Saat ini, pengelolaan aset daerah diarahkan untuk dilakukan secara digital melalui aplikasi online, seperti Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah maupun aplikasi sejenis yang dikembangkan oleh pemerintah daerah atau pihak ketiga. Namun, keterbatasan jaringan internet menyebabkan data aset tidak dapat diperbarui secara berkala, sehingga menyulitkan ketika diperlukan laporan secara real time maupun dalam proses pemeriksaan dan audit.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan kajian dan penelitian dengan judul “Pengelolaan Aset Daerah di Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan”.

METODE

Penelitian ini mengambil lokasi di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 1, Paringin, Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan 71612.

Pendekatan penelitian merupakan suatu strategi atau perencanaan yang dirancang untuk menentukan bagaimana proses penelitian akan dilaksanakan. Rancangan ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah atau pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian eksplanatif (penjelasan), yaitu pendekatan yang berfokus pada analisis hubungan antar variabel serta menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya.

Tipe studi yang diterapkan dalam penyusunan skripsi ini ialah studi kualitatif dengan pendekatan deskriptif atau deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif bertujuan untuk mencari solusi terhadap masalah yang ada saat ini. Dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif merupakan cara untuk menginterpretasikan data yang ada, seperti halnya mengenai keadaan yang dialami.

Jenis data yang diambil menurut Sugiyono (2016:25) dalam penelitian ini bersumber dari dua sumber data utama, yaitu :

1. Data Primer yaitu keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dan observasi langsung dilapangan, yang bersumber dari jumlah keseluruhan pegawai.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi literatur atau keperpustakaan serta data-data resmi yang didapat terhadap objek yang diteliti.

Sumber Data menurut Sugiyono (2016:25) adalah data yang digali dalam penelitian ini bersumber dari informan. Apabila riset menggunakan wawancara untuk mengumpulkan datanya, maka sumber data dikenal sebagai informan, yaitu individu yang memberikan respons dan menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah observasi sehingga sumber data juga disebut informan. Informan merujuk pada individu yang digunakan untuk memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi data. *Snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara berantai terhadap informan pangkal sampai infoeman kunci.

Desain operasional penelitian menurut Sugiyono (2016:2) adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat yang diamati. definisi operasional mencakup hal-hal penting dalam penelitian yang memerlukan penjelasan, bersifat spesifik, rinci, tegas dan pasti. Untuk menghindari kekeliruan dan kesalah pahaman dalam penelitian yang dikehendaki pada penelitian ini penulis berusaha membuat definisi operasional sebagai berikut:

Tabel 3.1

Desain Operasional Penelitian

Variabel	Sub Variabel	Indikator
G. Terry (2018:315) fungsi pengelolaan	1. Perencanaan	a. Perencanaan tujuan pengelolaan aset b. Penyusunan langkah-langkah pengelolaan aset c. Pengambilan keputusan atas perencanaan pengelolaan aset

	2. Pengorganisasian	a. Penempatan pengelola aset berdasarkan kemampuan/keahlian b. Pembagian tugas pengelolaan aset
	3. Penggerakan	a. Mengarahkan SDM dalam mengelola aset b. Pelaksanaan pengelolaan aset c. Ketercapaian tujuan pengelolaan aset
	4. Pengawasan	a. Mengawasi pelaksanaan pengelolaan aset b. Realisasi dari perencanaan pengelolaan aset c. Evaluasi dari pelaksanaan pengelolaan aset

Sumber : Diolah Peneliti, 2025

Untuk pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2016:217) sebagai berikut :

1. Wawancara

Yaitu teknik penggalian data yang penulis lakukan dengan cara wawancara bebas pada responden dan informan untuk melengkapi data yang digali melalui teknik lainnya.

2. Observasi (Pengamatan)

Yaitu teknik yang digunakan secara langsung pada objek untuk mendapatkan data dengan melihat, mengamati fenomena yang terjadi dan mencatat mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan Pengelolaan Aset Daerah di Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan.

3. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data-data didokumen atau arsip dan berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

Teknik analisa data merupakan bagian yang penting dalam suatu penelitian. Melalui teknik analisa data, maka data-data yang diperoleh diklasifikasikan secara diskriptif. Data-data yang telah disusun kemudian disajikan melalui proses yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang Pengelolaan Aset Daerah di Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan.

Menurut (Miles, Huberman dan Saldana, 2016:14), terdapat beberapa tahapan, yaitu :

1. Membangun presentasi, pada fase ini metode yang paling sederhana untuk maju adalah dengan membagi inovasi menjadi bagian-bagian atau elemen-elemen tertentu, menggunakan ini sebagai garis matriks. Sisi vertikal matriks mencakup periode waktu, mulai dari penggunaan awal hingga penggunaan selanjutnya. Jika terdapat perubahan pada elemen selama periode tersebut, kita dapat menambahkan penjelasan singkat mengenai perubahan itu (Miles, Huberman dan Saldana, 2016:14).
2. Memasukkan informasi. Pada fase ini, peneliti sedang mencari perubahan yang terjadi pada inovasi, elemen demi elemen. Perubahan tersebut dapat dicatat dalam catatan lapangan wawancara dengan pengguna inovasi yang telah diberi kode, yang secara khusus ditanya apakah mereka telah menciptakan sesuatu yang sudah diberi kode dalam buku inovasi.
3. Menganalisis informasi. Pada fase ini, peneliti dapat mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang situasi dengan merujuk kembali kepada elemen lain dari catatan lapangan, terutama informasi tambahan yang diberikan oleh orang-orang mengenai perubahan tersebut atau alasannya. Proses analisis informasi dalam penelitian

kualitatif berlangsung sejak sebelum ke lapangan, selama berada di lapangan, hingga setelah meninggalkan lapangan.

Dalam rangka mengupayakan keabsahan data, maka dibuat uji keabsahan data sebagaimana disimpulkan oleh sugiyono (dalam Patimah 2017:45) salah satu nya uji kredibilitas ialah kesesuaian antara konsep peneliti dengan konsep informan yaitu dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan *membercheck*.

Penelitian yang berjudul Pengelolaan Aset Daerah di Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan:

1. Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan pengamatan menunjukkan bahwa peneliti kembali ke lokasi penelitian, melakukan observasi dan wawancara dengan sumber data yang lama serta yang baru. Tujuan dari ini adalah untuk meningkatkan kedekatan antara peneliti dan narasumber agar semua informasi dapat diungkap tanpa ada yang ditutupi.

2. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan dengan lebih teliti dan terus-menerus. Dengan cara ini, data dan rangkaian kejadian dapat dicatat dengan tepat dan teratur. Dengan cara meningkatkan ketekunan tersebut, peneliti dapat melakukan verifikasi

3. Diskusi dengan Teman Sejawat

Bahan rujukan dalam konteks ini adalah keberadaan saksi yang dapat membuktikan informasi yang telah diperoleh oleh peneliti. Informasi mengenai hubungan antar manusia atau deskripsi suatu situasi perlu dilengkapi dengan gambar-gambar. Peralatan untuk merekam informasi dalam penelitian kualitatif, seperti kamera dan alat perekam suara, sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan terhadap data yang telah dikumpulkan oleh peneliti.

4. *Member check*

Member check merupakan langkah untuk memverifikasi informasi yang didapat oleh peneliti dari sumber data. Tujuan dari member check adalah untuk menilai seberapa akurat data yang diperoleh dibandingkan dengan informasi yang disampaikan oleh sumber data.

PEMBAHASAN

1. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan aset di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kantor secara optimal, efisien, serta selaras dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

a. Perencanaan Tujuan Pengelolaan Aset

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa perencanaan tujuan pengelolaan aset telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini tercermin dari upaya pengelola aset dalam menjamin tersedianya sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung kelancaran aktivitas Sekretariat Daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan administrasi, koordinasi, serta pembinaan terhadap perangkat daerah lainnya di Kabupaten Balangan.

Hasil observasi peneliti juga menunjukkan bahwa perencanaan tujuan pengelolaan aset berada dalam kategori baik. Seluruh tahapan pengelolaan aset tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri, serta peraturan daerah yang berlaku. Penerapan ketentuan tersebut bertujuan untuk memastikan pengelolaan aset dilakukan secara tertib dan tidak menimbulkan pelanggaran administrasi maupun hukum.

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat ditegaskan bahwa perencanaan tujuan pengelolaan aset telah berjalan dengan baik, di mana pengelola aset berupaya memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran tugas dan

fungsi Sekretariat Daerah dalam memberikan pelayanan administrasi, koordinasi, dan pembinaan kepada perangkat daerah terkait.

b. Penyusunan Langkah-Langkah Pengelolaan Aset

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa penyusunan langkah-langkah pengelolaan aset telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini terlihat dari proses pengelolaan aset di Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan yang disusun secara terstruktur dan sistematis, dimulai dari tahap perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, hingga penghapusan aset.

Hasil observasi peneliti juga menunjukkan bahwa penyusunan langkah-langkah pengelolaan aset berada dalam kategori baik. Pegawai secara rutin melaksanakan kegiatan inventarisasi aset untuk memastikan seluruh aset tercatat dengan lengkap dan sesuai dengan kondisi aktual di lapangan. Kegiatan inventarisasi tersebut meliputi pemeriksaan fisik aset, pembaruan data, serta pencocokan antara data administrasi dengan keberadaan aset secara nyata.

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa penyusunan langkah-langkah pengelolaan aset telah berjalan dengan baik. Pengelolaan aset di Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, mulai dari tahap perencanaan, pengadaan, hingga penghapusan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Pengambilan Keputusan Atas Perencanaan Pengelolaan Aset

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan dalam perencanaan aset telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini tercermin dari setiap proses pengadaan, pencatatan, pemanfaatan, hingga penghapusan aset yang dilakukan dengan berpedoman pada prosedur serta ketentuan yang berlaku.

Hasil observasi peneliti juga menunjukkan bahwa pengambilan keputusan terkait perencanaan aset berada dalam kategori baik. Pengelolaan aset dilaksanakan melalui keterlibatan berbagai pihak, seperti bagian keuangan, perlengkapan, serta pengawasan internal di Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan. Koordinasi yang terjalin antarbagian tersebut berperan dalam memastikan proses pengelolaan aset berjalan secara lancar, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat ditegaskan bahwa pengambilan keputusan atas perencanaan aset telah berjalan dengan baik. Setiap kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan, pencatatan, pemanfaatan, maupun penghapusan aset dilaksanakan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian pengelolaan aset merupakan rangkaian kegiatan pengaturan struktur kerja yang mencakup pembagian tugas, pelimpahan wewenang, serta penetapan tanggung jawab bagi pegawai atau unit kerja yang terlibat dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Balangan.

a. Penempatan Pengelola Aset Berdasarkan Kemampuan/Keahlian

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa penempatan pengelola aset berdasarkan kemampuan dan keahlian masih tergolong kurang baik. Kondisi ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan pengelola aset, khususnya dalam penguasaan sistem atau aplikasi pencatatan aset berbasis digital. Akibatnya, proses administrasi pengelolaan aset berjalan relatif lambat dan berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pencatatan data.

Hasil observasi peneliti juga menunjukkan bahwa penempatan pengelola aset belum sepenuhnya disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki. Sebagian pegawai belum optimal dalam memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan dalam pengelolaan aset. Padahal, penerapan sistem digital sangat diperlukan untuk mempercepat proses administrasi serta meningkatkan ketepatan dan keakuratan data aset.

Selanjutnya, hasil dokumentasi memperlihatkan bahwa penempatan pengelola aset berdasarkan kemampuan dan keahlian masih kurang sesuai. Hal ini tercermin dari latar belakang pendidikan pegawai pada bagian aset di Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan, di mana dari dua belas

orang pegawai yang bertugas, hanya tiga orang yang berpendidikan Strata Satu (S1), sedangkan sebagian besar lainnya masih berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) (Sumber: Data Pendidikan Pegawai, 2025).

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa penempatan pengelola aset berdasarkan kemampuan dan keahlian masih belum optimal. Keterbatasan pengetahuan dan rendahnya penguasaan sistem pencatatan aset berbasis digital menyebabkan proses administrasi berjalan kurang efektif serta meningkatkan risiko terjadinya ketidaktepatan data.

b. Pembagian Tugas Pengelolaan Aset

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pembagian tugas dalam pengelolaan aset masih berada pada kategori kurang baik. Hal ini disebabkan oleh belum jelasnya pembagian tugas dan tanggung jawab antarpegawai, sehingga dalam pelaksanaannya sering terjadi tumpang tindih pekerjaan.

Hasil observasi peneliti juga menunjukkan bahwa ketidakjelasan pembagian tugas pengelolaan aset berdampak langsung terhadap efektivitas pelaksanaannya. Beberapa tahapan kegiatan, seperti inventarisasi, pencatatan, dan pelaporan aset, menjadi kurang efisien karena tidak adanya penetapan tanggung jawab yang tegas bagi setiap pegawai pada masing-masing tahapan pengelolaan aset.

Selanjutnya, hasil dokumentasi memperlihatkan bahwa pembagian tugas dalam pengelolaan aset belum dirinci secara jelas. Kondisi ini terlihat dari masih adanya pegawai yang bukan merupakan pengelola aset, namun tetap dilibatkan dalam pelaksanaan tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab pegawai lain. Hal tersebut menunjukkan belum optimalnya pengaturan tugas dan fungsi dalam pengelolaan aset di Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan (Sumber: Data Tugas dan Fungsi, 2025).

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa pembagian tugas pengelolaan aset masih kurang baik. Ketidakjelasan pembagian tugas dan tanggung jawab antarpegawai menyebabkan terjadinya tumpang tindih pekerjaan dan menurunkan efektivitas pengelolaan aset.

3. Penggerakan

Penggerakan (*actuating*) merupakan tahapan manajemen yang berfokus pada upaya mengarahkan, mengoordinasikan, serta memotivasi seluruh pegawai yang terlibat dalam pengelolaan aset agar mampu melaksanakan tugas sesuai dengan rencana kerja dan struktur organisasi yang telah ditetapkan. Dalam lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan, penggerakan mencerminkan peran pimpinan, khususnya Sekretaris Daerah dan Bagian Umum, dalam mendorong pelaksanaan pengelolaan aset daerah agar berlangsung secara efektif, tertib secara administratif, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

a. Mengarahkan SDM Dalam Mengelola Aset

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pengarahan sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan aset masih tergolong kurang baik. Hal ini terlihat dari kondisi aset daerah yang belum tercatat secara akurat, di mana masih ditemukan aset yang tidak dilengkapi dokumen legalitas secara lengkap, tidak tercatat dengan baik dalam basis data, serta belum dilakukan penilaian secara berkala.

Hasil observasi peneliti juga menunjukkan bahwa pengarahan SDM dalam pengelolaan aset belum optimal akibat keterbatasan jumlah pegawai yang secara khusus menangani aset. Dengan jumlah personel yang terbatas, sebagian pegawai harus merangkap beberapa tugas sekaligus, baik dalam bidang administrasi maupun teknis, sehingga pelaksanaan pengelolaan aset menjadi kurang fokus dan tidak maksimal.

Selanjutnya, hasil dokumentasi memperlihatkan bahwa kondisi tersebut berdampak pada ketidaksesuaian antara keadaan aset di lapangan dengan data administrasi yang dimiliki. Beberapa aset, seperti peralatan kantor berupa laptop sebanyak 11 unit, printer sebanyak 8 unit, serta kendaraan dinas sebanyak 5 unit, tercatat tidak sesuai, dinyatakan hilang, atau tidak berada

pada lokasi sebagaimana tercantum dalam data administrasi (Sumber: Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan, 2025).

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa pengarahannya SDM dalam pengelolaan aset masih kurang baik. Kondisi ini ditandai dengan ketidakakuratan pencatatan aset, ketidaklengkapan dokumen legalitas, serta belum optimalnya pelaksanaan penilaian aset secara berkala.

b. Pelaksanaan Pengelolaan Aset

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan aset masih berada pada kategori kurang baik. Kondisi ini disebabkan oleh keterbatasan kompetensi pegawai, baik dari aspek teknis maupun administratif, sehingga pemanfaatan aset belum dapat dilakukan secara optimal dan potensi aset belum sepenuhnya dimaksimalkan.

Hasil observasi peneliti juga menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan aset belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari masih banyaknya aset yang tidak dimanfaatkan atau dibiarkan tanpa pengelolaan yang jelas. Keadaan tersebut mencerminkan belum adanya perencanaan strategis yang memadai dalam pengelolaan aset, sehingga peran aset dalam mendukung kegiatan pemerintahan daerah menjadi terbatas.

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan aset masih kurang baik. Rendahnya kompetensi pegawai, baik secara teknis maupun administratif, menjadi faktor utama yang menyebabkan potensi aset belum dapat dimanfaatkan secara maksimal di Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan.

c. Ketercapaian Tujuan Pengelolaan Aset

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa tingkat ketercapaian tujuan pengelolaan aset masih tergolong kurang baik. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan jaringan internet yang mengakibatkan proses pembaruan data aset berjalan lambat dan tidak konsisten. Dalam pelaksanaannya, pegawai kerap mengalami kendala berupa kegagalan masuk ke sistem maupun kegagalan sinkronisasi data saat melakukan input data terbaru.

Hasil observasi peneliti juga menunjukkan bahwa ketercapaian tujuan pengelolaan aset belum optimal akibat kondisi jaringan internet yang belum memadai. Keterbatasan tersebut sangat menghambat seluruh tahapan pengelolaan aset daerah, terutama dalam penggunaan aplikasi pengelolaan aset berbasis digital seperti SIMANDOR yang seharusnya mendukung percepatan pencatatan, namun sering tidak dapat diakses karena koneksi yang tidak stabil.

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa ketercapaian tujuan pengelolaan aset masih kurang baik. Keterbatasan jaringan internet menyebabkan proses pembaruan data aset menjadi lambat dan tidak konsisten, sehingga berdampak pada belum optimalnya pencapaian tujuan pengelolaan aset di Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan.

4. Pengawasan

Pengawasan pengelolaan aset merupakan kegiatan pengendalian yang dilakukan untuk memonitor, mengevaluasi, serta memastikan bahwa seluruh aktivitas yang berkaitan dengan Barang Milik Daerah (BMD) di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Balangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar operasional prosedur (SOP), serta berlandaskan pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

a. Mengawasi Pelaksanaan Pengelolaan Aset

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan aset masih tergolong kurang baik. Kondisi ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, sehingga beberapa kegiatan pengelolaan aset memerlukan penyesuaian dalam pelaksanaannya di lapangan. Akibatnya, tidak seluruh rencana pengelolaan aset dapat direalisasikan secara optimal.

Hasil observasi peneliti juga menunjukkan bahwa pengawasan pelaksanaan pengelolaan aset belum berjalan secara maksimal. Beberapa kegiatan harus disesuaikan dengan kondisi aktual di lapangan karena adanya keterbatasan anggaran, waktu, dan tenaga kerja. Situasi tersebut

menyebabkan penentuan prioritas kegiatan dilakukan secara situasional dan tidak selalu sejalan dengan perencanaan awal.

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan aset masih kurang baik. Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia menjadi faktor utama yang menyebabkan sebagian rencana pengelolaan aset belum dapat dilaksanakan secara optimal di Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan.

b. Realisasi Dari Perencanaan Pengelolaan Aset

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa realisasi perencanaan pengelolaan aset masih berada pada kategori kurang baik. Kondisi ini ditandai dengan masih adanya sejumlah aset yang belum tercatat secara lengkap, khususnya aset lama yang informasinya belum diperbarui. Akibatnya, data aset yang tersedia belum sepenuhnya menggambarkan kondisi riil aset di lapangan.

Hasil observasi peneliti juga menunjukkan bahwa realisasi pengelolaan aset belum berjalan secara optimal. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa kendala, antara lain keterbatasan waktu, sumber daya manusia, serta belum tersedianya sistem pendataan aset yang terintegrasi secara menyeluruh antarbidang terkait.

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa realisasi perencanaan pengelolaan aset masih kurang baik. Masih terdapat aset yang belum terdata secara lengkap, terutama aset lama yang belum diperbarui informasinya, sehingga data aset yang ada belum sepenuhnya mencerminkan kondisi sebenarnya di Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan.

c. Evaluasi Dari Pelaksanaan Pengelolaan Aset

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi dari pelaksanaan pengelolaan aset kurang baik yang mana ketidaktepatan data, keterlambatan pelaporan, dan kurangnya pembaruan inventaris sering kali belum ditindaklanjuti dengan sistem yang konsisten. Hal ini menyebabkan beberapa kendala muncul kembali pada periode berikutnya.

Hasil observasi peneliti terlihat evaluasi dari pelaksanaan pengelolaan aset kurang baik yang mana efektivitas pengelolaan aset masih belum mencapai hasil yang diharapkan. Beberapa proses, seperti pencatatan dan pelaporan, masih memerlukan waktu lebih lama dan belum sepenuhnya akurat.

Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa evaluasi dari pelaksanaan pengelolaan aset kurang baik yang mana ketidaktepatan data, keterlambatan pelaporan, dan kurangnya pembaruan inventaris sering kali belum ditindaklanjuti dengan sistem yang konsisten. Hal ini menyebabkan beberapa kendala muncul kembali pada periode berikutnya.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Aset Daerah di Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan.

1. Faktor Penghambat

a. Pegawai Belum Memahami Prosedur Dan Aturan Teknis

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa rendahnya pemahaman pegawai terhadap prosedur dan aturan teknis pengelolaan aset menyebabkan masih sering terjadinya kesalahan dalam pencatatan aset tetap. Kondisi tersebut berdampak pada ketidakakuratan data yang tercantum dalam laporan inventaris barang, sehingga tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi aktual aset di lapangan.

Hasil observasi peneliti juga menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman terhadap prosedur pengamanan dan penatausahaan aset berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti aset yang tidak terpantau dengan baik, terjadinya penyalahgunaan, bahkan kehilangan aset yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat ditegaskan bahwa kurangnya pemahaman terhadap prosedur dan aturan teknis pengelolaan aset menjadi salah satu

penyebab utama terjadinya kesalahan pencatatan aset tetap. Akibatnya, data inventaris barang belum mencerminkan kondisi riil aset yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan.

b. Terbatasnya Jumlah Pegawai Yang Menangani

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa keterbatasan jumlah pegawai menyebabkan pembagian beban kerja dalam pengelolaan aset menjadi tidak proporsional. Dalam praktiknya, seorang pegawai kerap harus merangkap beberapa tanggung jawab sekaligus, seperti melakukan pencatatan, penyusunan laporan, hingga pengawasan aset

Hasil observasi peneliti juga menunjukkan bahwa minimnya jumlah personel berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan pengawasan dan pemantauan aset di lapangan. Akibatnya, kegiatan monitoring tidak dapat dilakukan secara rutin, sehingga meningkatkan potensi terjadinya penyalahgunaan aset, kehilangan, maupun kondisi aset yang kurang terawat karena tidak adanya pemantauan secara berkala.

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa keterbatasan jumlah pegawai menjadi salah satu faktor yang menyebabkan ketidakseimbangan beban kerja dalam pengelolaan aset. Kondisi ini mengakibatkan satu pegawai harus menangani berbagai tugas secara bersamaan, termasuk pencatatan, pelaporan, dan pengawasan aset di Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan.

c. Ketidakjelasan Pembagian Tugas

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa ketidakjelasan pembagian tugas dalam pengelolaan aset tetap menyebabkan beberapa pegawai melaksanakan pekerjaan yang sama, sementara tugas lainnya justru tidak tertangani. Kondisi tersebut menimbulkan tumpang tindih pekerjaan dan berdampak pada rendahnya tingkat efisiensi dalam pengelolaan aset tetap

Hasil observasi peneliti juga menunjukkan bahwa struktur organisasi yang belum didukung oleh pembagian tugas yang jelas dan terencana berpengaruh langsung terhadap efektivitas pelaksanaan pekerjaan. Pekerjaan menjadi kurang terarah, pencapaian target sulit diwujudkan, serta kualitas pengelolaan aset tetap mengalami penurunan, yang pada akhirnya berdampak pada kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan secara keseluruhan.

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa ketidakjelasan pembagian tugas menjadi salah satu faktor utama terjadinya tumpang tindih pekerjaan dan ketidakefisienan dalam pengelolaan aset tetap. Kondisi ini menyebabkan sebagian pekerjaan tidak tertangani secara optimal, sementara pekerjaan lainnya dikerjakan secara berulang oleh pegawai yang sama.

d. Data Aset Yang Tidak Akurat

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa ketidakakuratan data aset berdampak pada kesulitan pimpinan dalam menentukan kebutuhan riil aset daerah. Kondisi tersebut menyebabkan pengambilan keputusan terkait pengadaan, pemeliharaan, maupun penghapusan aset menjadi kurang tepat sasaran karena didasarkan pada informasi yang tidak akurat atau belum diperbarui.

Hasil observasi peneliti juga menunjukkan bahwa ketidaktepatan data aset menimbulkan perbedaan antara data yang tercatat secara administratif dengan kondisi aset yang sebenarnya di lapangan. Ketidakesesuaian ini mencerminkan belum optimalnya sistem pencatatan dan pengendalian aset.

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat ditegaskan bahwa data aset yang tidak akurat menjadi salah satu kendala utama dalam pengelolaan aset daerah. Informasi yang tidak mutakhir menyebabkan pimpinan mengalami kesulitan dalam menetapkan kebijakan pengadaan, pemeliharaan, dan penghapusan aset secara tepat di Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan.

e. Tidak Adanya Evaluasi Yang Terjadwal

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa tidak dilaksanakannya evaluasi secara rutin menyebabkan berbagai permasalahan dalam pengelolaan aset, seperti kesalahan pencatatan, kerusakan aset, maupun aset yang tidak dimanfaatkan, tidak dapat teridentifikasi

sejak dini. Akibatnya, permasalahan yang seharusnya dapat segera ditangani justru berkembang menjadi lebih kompleks pada waktu berikutnya.

Hasil observasi peneliti juga menunjukkan belum adanya mekanisme evaluasi yang mampu memastikan kinerja pegawai dalam pengelolaan aset berjalan sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku. Kondisi ini berdampak pada menurunnya tingkat akuntabilitas serta membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan aset.

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa ketiadaan evaluasi rutin menjadi salah satu faktor penghambat dalam pengelolaan aset. Berbagai kendala, seperti kesalahan pencatatan, kerusakan aset, dan aset yang tidak termanfaatkan, tidak dapat terdeteksi secara cepat sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan yang lebih besar di Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan pada masa mendatang.

f. Keterbatasan Anggaran

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala utama dalam pengelolaan aset. Kondisi ini mengakibatkan kegiatan pemeliharaan rutin aset tidak dapat dilaksanakan secara optimal, sehingga banyak aset cepat mengalami kerusakan atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Akibatnya, umur ekonomis aset menjadi lebih pendek dan nilai manfaatnya menurun.

Hasil observasi peneliti juga menunjukkan bahwa kekurangan dana berdampak pada sulitnya instansi melakukan pengadaan aset baru untuk mendukung kegiatan operasional. Kondisi ini menyebabkan keterbatasan sarana dan prasarana kerja, menurunkan produktivitas pegawai, serta menghambat kelancaran pelayanan publik di Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan.

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa keterbatasan anggaran menghambat pemeliharaan dan pengadaan aset. Hal ini menyebabkan aset cepat rusak, umur ekonomis aset menurun, serta berdampak negatif terhadap efektivitas operasional dan pelayanan publik.

2. Faktor Pendukung

a. Adanya upaya Memastikan Ketersediaan Sarana Dan Prasarana

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, seperti komputer, perangkat jaringan, serta aplikasi pengelolaan aset, memberikan dukungan signifikan bagi pegawai dalam melaksanakan tugas administrasi dan penyusunan laporan aset. Keberadaan fasilitas ini memungkinkan pekerjaan dilakukan lebih cepat, efisien, dan akurat.

Hasil observasi peneliti juga menunjukkan bahwa pemanfaatan sarana, seperti sistem komputerisasi dan aplikasi berbasis digital, membantu mengurangi kesalahan pencatatan secara manual. Selain itu, data aset dapat tersimpan dengan lebih aman dan mudah diakses kembali ketika dibutuhkan, misalnya untuk keperluan audit atau evaluasi.

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai memainkan peran penting dalam menunjang kelancaran administrasi dan pelaporan aset, meningkatkan efisiensi kerja, serta memastikan akurasi data di Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan.

b. Pengelolaan Aset Setiap Tahapan Dilakukan Sesuai Aturan

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan prosedur pengelolaan aset yang sesuai dengan peraturan menjamin setiap aset dicatat, diinventarisasi, dan dilaporkan secara tepat. Penerapan prosedur ini menghasilkan data aset yang akurat dan dapat dipercaya, sehingga menjadi dasar yang valid bagi penyusunan laporan keuangan serta pengambilan keputusan manajerial.

Hasil observasi peneliti juga menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap prosedur dalam pengelolaan aset mendukung keterbukaan informasi dan tanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil. Kondisi ini mencerminkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan prosedur sesuai aturan berperan penting dalam memastikan pencatatan, inventarisasi, dan pelaporan aset dilakukan secara tepat, menghasilkan data yang akurat, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas di Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan.

c. Aset Dilakukan Berdasarkan Prosedur Dan Ketentuan Yang Berlaku

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan aset yang berlandaskan pada prosedur dan ketentuan yang berlaku menjamin setiap kegiatan, mulai dari pengadaan hingga penghapusan, memiliki dasar hukum yang jelas. Penerapan ketentuan ini memberikan kepastian hukum bagi instansi dan meminimalkan risiko terjadinya pelanggaran administratif.

Hasil observasi peneliti juga menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku memastikan data aset yang dicatat sah, valid, dan terverifikasi. Kondisi ini mendukung keandalan laporan Barang Milik Daerah dan menjamin transparansi pengelolaan aset.

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan aset sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku memberikan kepastian hukum, menjamin keabsahan data aset, serta mengurangi potensi pelanggaran administrasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan aset daerah di Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan secara keseluruhan masih tergolong kurang optimal. Analisis berdasarkan sub variabel manajemen aset menunjukkan bahwa meskipun perencanaan telah dilaksanakan dengan baik, aspek pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan masih menghadapi sejumlah kendala. Pada sub variabel perencanaan, tujuan pengelolaan aset sudah baik, karena pengelola aset memastikan tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran kegiatan administrasi dan koordinasi di Sekretariat Daerah. Langkah-langkah pengelolaan aset disusun secara sistematis mulai dari perencanaan, pengadaan, hingga penghapusan, dan pengambilan keputusan dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Hal ini menghasilkan dasar yang jelas bagi pelaksanaan pengelolaan aset dan mendukung akurasi data. Namun, pada sub variabel pengorganisasian, terdapat beberapa kendala. Penempatan pegawai berdasarkan kemampuan dan keahlian kurang optimal, karena sebagian petugas belum menguasai sistem atau aplikasi pencatatan aset berbasis digital, sehingga administrasi berjalan lambat dan rawan terjadi kesalahan data. Selain itu, pembagian tugas belum jelas, sehingga terjadi tumpang tindih pekerjaan dan sebagian kegiatan pengelolaan aset kurang terfokus. Pada sub variabel penggerakan, pengarahan SDM dalam pengelolaan aset masih kurang baik. Beberapa aset belum tercatat secara akurat, dokumen legalitas tidak lengkap, dan penilaian aset belum dilakukan secara berkala. Pelaksanaan pengelolaan aset juga kurang optimal karena pegawai yang bertanggung jawab sering kali belum memiliki kompetensi teknis maupun administrasi yang memadai. Selain itu, keterbatasan jaringan internet menyebabkan pembaruan data aset berjalan lambat dan tidak konsisten, sehingga ketercapaian tujuan pengelolaan aset menjadi terbatas. Di sisi pengawasan, pelaksanaan monitoring aset juga belum optimal. Beberapa kegiatan harus disesuaikan dengan kondisi lapangan akibat keterbatasan anggaran dan SDM. Realisasi perencanaan pengelolaan aset kurang baik karena masih terdapat aset lama yang belum tercatat atau diperbarui informasinya.

Evaluasi pengelolaan aset juga belum rutin, sehingga kesalahan pencatatan, keterlambatan pelaporan, dan aset yang tidak termanfaatkan tidak segera terdeteksi.

Berdasarkan analisis faktor, terdapat beberapa faktor penghambat yang memengaruhi pengelolaan aset, yaitu: kurangnya pemahaman pegawai terhadap prosedur dan aturan teknis, keterbatasan jumlah pegawai, ketidakjelasan pembagian tugas, data aset yang tidak akurat, ketiadaan evaluasi rutin, serta keterbatasan anggaran. Sementara itu, faktor pendukung meliputi tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, pelaksanaan pengelolaan aset sesuai prosedur dan ketentuan, serta penerapan prosedur yang tepat yang menjamin pencatatan dan pelaporan aset akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

George R. Terry, L. W. 2018. Dasar-Dasar Manajemen Cetakan Kesebelas. PT. Bumi Aksara, Jakarta

Ratminto & Atik Septi Winarsih. 2017. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Miles, Huberman dan Saldana, 2017. *Qualitative Data Analysis A Methode Sourcebook*. Publications.

Zahroh. 2015. *Membangun Kualitas Pembelajaran melalui Dimensi*. Bandung: Yrama Widya

Sugiyono. 2016, *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung : Alfabeta Bandung.

Tim Penyusun, 2025. *Pedoman Penyusunan Skripsi STIA Amuntai*.